



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faximile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, 10 November 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST. MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 mendasarkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

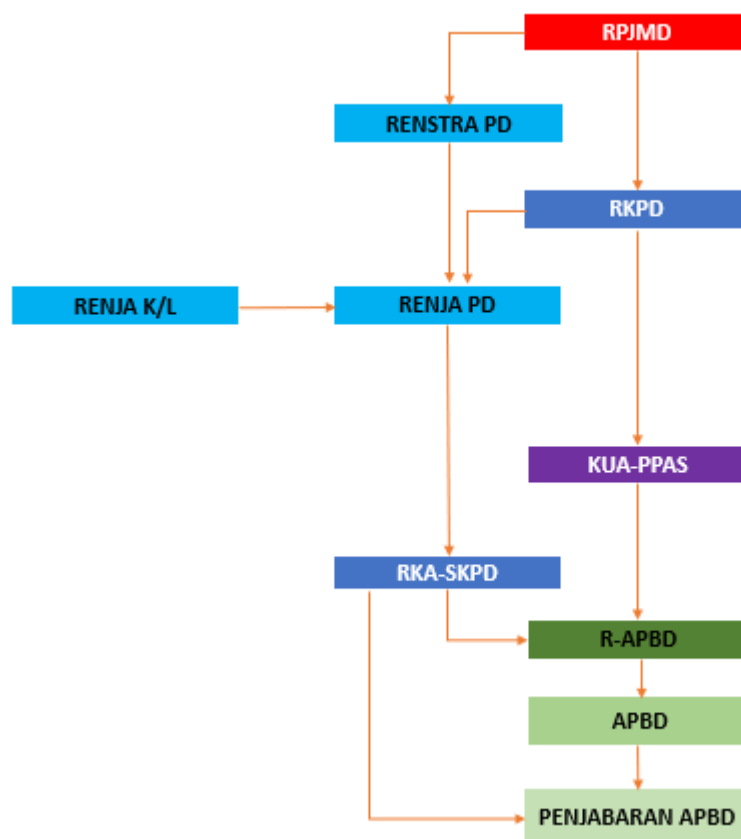
Tahapan penyusunan Renja PD meliputi : persiapan penyusunan Renja PD berupa koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Bulan Desember 2021, penyusunan Rancangan Awal Renja PD mendasarkan dengan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050.24/0017371 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, penyusunan Rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD mendasarkan dengan SE Sekda Nomor : 050.24/0002645 Tanggal 9 Februari 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perumusan Rancangan Akhir Renja PD, dan yang terakhir penetapan Renja PD.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2023, Renja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Setelah tahap perencanaan selesai dilanjutkan pada tahap penganggaran :

1. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD;
2. Kepala Daerah Bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) selanjutnya Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Kepala Daerah;
3. Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
4. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan serta Renja PD terkait dengan target kinerja dan pagu indikatif;
5. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya menyusun rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, rencana peraturan tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah.



Gambar I.1. Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
36. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang;
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
45. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

52. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
53. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
54. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
56. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
58. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
60. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
61. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

64. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
65. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
67. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
68. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
69. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
70. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
71. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomo 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
72. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
73. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
74. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
75. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
76. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/2/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah;
77. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
78. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan

anggaran / pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 pada tahun ke-5 periode Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; Analisa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; Review terhadap rancangan RKPD Prov. Jateng Tahun 2023 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024.
- BAB V : PENUTUP
Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2021 dan Capaian Renstra PD

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.204.112.865.000,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2021 sebesar 95,35 % atau sebesar Rp.194.619.417,057,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Dengan gambaran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Dari 33 indikator program sebanyak 1 indikator program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu : Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 60,67% dari target yang sudah ditetapkan 64,43% dengan tingkat capaian 94,16%.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 33 indikator program sebanyak 15 indikator program yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - 1) Sebanyak 9 indikator program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Kantor Dinas, BPSPP Wilayah I s.d VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah) dengan tingkat capaian 100%;
 - 2) Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 28,57% dari target yang sudah ditetapkan 28,57% dengan tingkat capaian 100%;
 - 3) Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 31,92% dari target yang sudah ditetapkan 31,92% dengan tingkat capaian 100%;
 - 4) Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi *Passing Grade* pemahaman keselamatan jalan, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 3,89% dari target yang sudah ditetapkan 3,89% dengan tingkat capaian 100%;
 - 5) Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 25,00% dari target yang sudah ditetapkan 25,00% dengan tingkat capaian 100%;
 - 6) Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 33,33% dari target yang sudah ditetapkan 33,33% dengan tingkat capaian 100%;

- 7) Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api, sampai dengan Tahun 2021 tercapai 9,09% dari target yang sudah ditetapkan 9,09% dengan tingkat capaian 100%;

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 166 indikator kegiatan sebanyak 147 indikator kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 33 Indikator program sebanyak 17 Indikator program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Sebanyak 12 indikator program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I s.d VI yaitu :

- a. Pembaharuan Izin AKDP yang berbadan hukum (6 Indikator) diantaranya Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 51,59% dari target yang sudah ditetapkan 50,15% dengan tingkat capaian 102,87%; Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B sampai dengan Tahun 2021 tercapai 41,46% dari target yang sudah ditetapkan 39,56% dengan tingkat capaian 104,80%; Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 50,28% dari target yang sudah ditetapkan 48,99% dengan tingkat capaian 102,63%; Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 79,26% dari target yang sudah ditetapkan 78,08% dengan tingkat capaian 101,51%; Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B sampai dengan Tahun 2021 tercapai 65,88% dari target yang sudah ditetapkan 64,7% dengan tingkat capaian 101,82%; Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 83,77% dari target yang sudah ditetapkan 82,49% dengan tingkat capaian 101,55%.
- b. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (6 indikator) diantaranya Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 21,88% dari target yang sudah ditetapkan 18,75% dengan tingkat capaian 116,69%; Persentase Rehabilitasi

Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B sampai dengan Tahun 2021 tercapai 35,00% dari target yang sudah ditetapkan 25,00% dengan tingkat capaian 116,67%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 43,75% dari target yang sudah ditetapkan 37,50% dengan tingkat capaian 116,67%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 19,23% dari target yang sudah ditetapkan 15,38% dengan tingkat capaian 125,03%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B sampai dengan Tahun 2021 tercapai 53,85% dari target yang sudah ditetapkan 46,15% dengan tingkat capaian 116,68%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A sampai dengan Tahun 2021 tercapai 20,69% dari target yang sudah ditetapkan 17,24% dengan tingkat capaian 120,01%.

- 2) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang sampai dengan Tahun 2021 tercapai 25,06% dari target yang sudah ditetapkan 23,86% dengan tingkat capaian 105,03%;
- 3) Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM sampai dengan Tahun 2021 tercapai 5,14% dari target yang sudah ditetapkan 4,87% dengan tingkat capaian 105,54%;
- 4) Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan sampai dengan Tahun 2021 tercapai 21,88% dari target yang sudah ditetapkan 20,31% dengan tingkat capaian 107,73%;
- 5) Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum sampai dengan Tahun 2021 tercapai 85,63% dari target yang sudah ditetapkan 85,58% dengan tingkat capaian 100,06%;
- 6) Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin sampai dengan Tahun 2021 tercapai 47,39% dari target yang sudah ditetapkan 40,86% dengan tingkat capaian 115,98%.

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 166 indikator kegiatan sebanyak 19 indikator kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :
 - a. Penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa pada Tahun 2021 diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak Tanggal 3 Juli 2021

- dan adanya Pembatasan *Load Factor* angkutan laut maksimal 50% untuk pemenuhan protokol kesehatan;
- b. Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan *Stakeholders* terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
 - c. Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan:
 - a) Dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD dan pembaharuan maupun perubahan izin perusahaan JPT angkutan laut dengan adanya Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin;
 - b) Adanya capaian lebih pada penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Tahun 2021 dari target 12 lokasi tercapai 15 lokasi dikarenakan penambahan pemenuhan penanganan DRK di 3 lokasi yaitu kawasan objek wisata bandungan, *Black Spot* di Kab. Temanggung dan Kab. Pati (bantuan teknis BPTD Wilayah X);
 - c) Adanya capaian lebih pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan Provinsi sebanyak 10 unit pada perubahan anggaran yang dipasang di Ruas Jalan Lemahabang - Kaloran / Bts. Kab. Temanggung;
 - d) Terdapat Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang masuk dalam perhitungan Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan;
 - e) Tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 sebagai berikut :
- a. Implikasi dari tidak tercapainya indikator program Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa menurunnya jumlah kunjungan orang dari/ke Karimunjawa;
 - b. Implikasi dari terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah serta dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan jika ada evaluasi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk indikator program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan perlu upaya untuk peningkatan kepercayaan masyarakat agar menggunakan angkutan umum untuk

menuju/dari Karimunjawa dengan melaksanakan/menerapkan protokol Kesehatan pada angkutan umum secara ketat termasuk penggunaan fasilitas *Check In* di aplikasi peduli lindungi pada setiap simpul transportasi kewenangan provinsi sebagai upaya penanganan pandemi.

Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Renja PD Tahun 2022 dan 2023 menggunakan nomenklatur Kepmendagri tersebut dengan mengacu hasil pemetaan program/kegiatan antara yang tertuang di dalam Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan program/kegiatan dalam Kepmendagri. Adapun persandingan program/kegiatan tersebut sebagai berikut :

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah		
		Tahun 2019 & 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 & 2023
1	PERHUBUNGAN	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Pengembangan Perhubungan Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Pengelolaan Penerbangan	-
		Pengelolaan Perkeretaapian	Pengelolaan Perkeretaapian	
Pengembangan Perhubungan Laut	Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran		

Hasil reuiu dituangkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X										
X	XX									
X	XX	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100,00
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-Kantor Dinas Perhubungan	100	100	100	100	100,00
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah I Kelas A	100	100	100	100	100,00
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah II Kelas B	100	100	100	100	100,00
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah III Kelas A	100	100	100	100	100,00
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah IV Kelas A	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah V Kelas B	100	100	100	100	100,00		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-BPSPP Wilayah VI Kelas A	100	100	100	100	100,00		
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah-Balai Transportasi Jawa Tengah	100	100	100	100	100,00		
X	XX	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	20	8	4	4	100,00
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	46	18	9	9	100,00
X	XX	01	1.02	Administrasi Keuangan					
				Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis)	60	24	12	12	100,00
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-Kantor Dinas Perhubungan					
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan)	60	24	12	12	100,00
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	60	24	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	24	12	12	100,00
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	15.000	7319	3000	3019	100,63
		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	36	5			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	46	10			
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	350	118	5	5	100,00
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah I Kelas A			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	60	24			
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah II Kelas B			
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	60	24	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	60	24	12	12	100,00		
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	60	24	12	12	100,00		
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	60	24	12	12	100,00		
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah III Kelas A					
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	60	24	12	12	100,00
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	60	24	12	12	100,00
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	60	24	12	12	100,00
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	60	24	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	60	24	12	12	100,00
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah IV Kelas A			
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	60	24	12	12	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah V Kelas B						
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	60	24	12	12	100,00
					Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	60	24	12	12	100,00
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	60	24	12	12	100,00
					Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	60	24	12	12	100,00
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	60	24	12	12	100,00
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-BPSPP Wilayah VI Kelas A						
					Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	60	24	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	60	24	12	12	100,00	
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	60	24	12	12	100,00	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	60	24	12	12	100,00	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	60	24	12	12	100,00	
X	XX	01	1.03	Administrasi Umum-Balai Transportasi Jawa Tengah				
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah)	60	12	12	100,00
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	60	12	12	100,00
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	60	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	60	24	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	60	12			
X	XX	01	1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
				Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	24	
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	500	173	15
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
				Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	52,34	16,93	23,86
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50	20	30
						25,06	105,03
						35	116,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	38,46	46,15	53,85	116,68
		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	4,72	4,87	5,14	105,54
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	39,12	39,56	41,46	104,80
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	64,47	64,7	65,88	101,82
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	19,05	28,57	28,57	100,00
		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	10,94	20,31	21,88	107,73
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	49,74	50,15	51,59	102,87
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	31,25	12,5	18,75	21,88	116,69
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	48,52	48,99	50,28	102,63
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	31,25	37,5	43,75	116,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	77,81	78,08	79,26	101,51		
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	7,69	15,38	19,23	125,03		
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	83,55	82,34	82,49	83,77	101,55		
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	13,79	17,24	20,69	120,01		
		Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	27,36	31,92	31,92	100,00		
		Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	94,45	82,53	85,58	85,63	100,06		
		Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	3,89	3,89	3,89	100,00		
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					
				Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok)		15	3	3	100,00
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-Bidang Lalu Lintas					
				Pengadaan dan Pemasangan APILL	24	6	2	2	100,00
				Pengadaan dan Pemasangan LPJU	4.747	663	174	174	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengadaan dan Pemasangan Rambu	5.191	600	478	478	100,00
					Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	251	60	46	46	100,00
					Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	167	16	8	8	100,00
					Pengadaan dan Pemasangan ITS	2	0			
					Pengadaan Aplikator Marka (Unit)	4	3			
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah I Kelas A						
					Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	70	50	50	100,00
					Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	90	49	49	100,00
					Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	20	4	3	3	100,00
					Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	20	8	2	2	100,00
					Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	250	100	40	40	100,00
					Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	50	30	30	100,00
					Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85.000	17000	9252	9.252	100,00
					Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah II Kelas B						
					Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	50	52	52	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	83	53	53	100,00		
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	20	4	2	3	150,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	20	13	3	3	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	250	160	33	33	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	50	36	36	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85.000	17000	8548	8.548	100,00		
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00		
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah III Kelas A					
				Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	130	52	52	100,00
				Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	104	45	45	100,00
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	20	5	2	2	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	20	8	4	4	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	250	300	50	50	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	50	25	25	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85000	17000	8516	8.516	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00		
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah IV Kelas A					
				Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	50	52	52	100,00
				Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	70	45	45	100,00
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	20	2	3	3	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	10	2	1	1	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	500	125	100	100	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	38	30	30	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85000	17000	8548	8548	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	500	150	50	50	100,00
				Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah V Kelas B					
				Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	80	52	52	100,00
				Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	80	45	45	100,00
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan	20	5	2	2	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		(lok)							
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	20	8	2	2	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	500	222	50	50	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	58	25	25	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85000	17000	9032	9032	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh)	250	100	25	25	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	750	300	75	75	100,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh)	250	100	25	25	100,00		
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00		
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-BPSPP Wilayah VI Kelas A					
				Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	250	70	44	44	100,00
				Jumlah Penggantian LPJU (unit)	200	90	40	40	100,00
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	20	4	2	2	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	20	4	4	4	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	500	200	60	60	100,00
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	250	40	30	30	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	85.000	17000	8548	8548	100,00
					Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	100	100	100	100	100,00
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi-Balai Transportasi Jawa Tengah						
					Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng	5	2	5	5	100,00
2	15	02	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						
					Pembangunan Terminal (Terminal)	1	0	1	1	100,00
					Pengadaan Tanah Terminal (Paket)	2	0			
					Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali)	16	1	4	4	100,00
					Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Type B (Terminal)	23	23			
					Pengembangan Terminal (Terminal)	23	6	6	6	100,00
					Pengadaan dan Pemasangan CCTV (Terminal)	2	2	-	-	-
					Penerapan Sistem Informasi (Terminal)	-	-	-	-	-
2	15	02	1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						
					Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota)	70	29	14	14	100,00
					Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi)	30	8	6	6	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok)	60	23	14	14	100,00		
2	15	02	1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					
				Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok)	106	43	20	42	210,00
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-Bidang Lalu Lintas					
				Jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang)	362	76	-	-	-
				Jumlah AKUT (Org)	500	100	-	-	-
				Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend)	3575	1247	720	720	100,00
				Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan)	40	5	40	40	100,00
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah I Kelas A					
				Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	431.235	132118	43124	43.536	100,96
				Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	960	939	-	-	-
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah II Kelas B					
				Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type	93.485	26031	9349	9.412	100,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B (Kend)					
		Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	1.135	954			
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah III Kelas A			
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	93.485	1.054.687	377334	383.790	101,71
		Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	1.135	1060	-	-	-
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah IV Kelas A			
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	350.120	113060	35012	35.243	100,66
		Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	2.500	1721	-	-	-
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah V Kelas B			
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	873.310	252238	87331	87.433	100,12
		Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	3.545	972	-	-	-
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan-BPSPP Wilayah VI Kelas A			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	760.125	229487	76013	76.245	100,31		
		Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	8.100	2043					
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-Balai Transportasi Jawa Tengah					
				Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor	7	5	6	6	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-Bidang Angkutan Jalan					
				Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok)	28	28	28	28	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah I Kelas A					
				Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	15	3	3	3	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah II Kelas B					
				Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	10	2	2	2	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah III Kelas A					
				Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	55	11	11	11	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah IV Kelas A					
				Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	25	5	5	5	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah V Kelas B					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	20	5	4	4	100,00
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah ProvinsiBPSPP Wilayah VI Kelas A						
					Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	25	5	5	5	100,00
2	15	02	1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
					Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok)	6	3	2	2	100,00
					Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal (Dok)	2	0	-	-	-
					Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi (Org)	700	300	-	-	-
					Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng (Paket)	1	0	-	-	-
					Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM	2	0	-	-	-
2	15	02	1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek)	5	2	1	1	100,00
2	15	02	1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
					Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok)	5	1	1	1	100,00
					Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan)	5	1	1	1	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-Bidang Angkutan Jalan						
					Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan)	150	30	30	32	106,67
					Jumlah penerbitan perizinan trayek AKDP (Penerbitan)	3125	1388	407	833	204,67
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah I Kelas A						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	1.810	726	181	185	102,21
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	30	20	18	18	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah II Kelas B			
		Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	1.400	339	141	147	104,26
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	60	16	12	12	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah III Kelas A			
		Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	1.400	740	140	280	200,00
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	100	28	20	20	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah IV Kelas A					
				Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	2.065	1162	207	209	100,97
				Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	75	20	15	15	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi-BPSPP Wilayah V Kelas B					
				Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (Kend)	2.515	994	252	255	101,19
				Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (Perusahaan)	65	26	13	13	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah ProvinsiBPSPP Wilayah VI Kelas A					
				Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	2.465	1422	247	250	101,21
				Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	75	15	15	15	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2	15	02	1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
				Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan)	5	1	1	100,00	
				Pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek pengusaha dan pengemudi (Perusahaan)	190	20	-	-	
2	15	02	1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
				Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi (Trayek)	-	20	-	-	
2	15	03		PENGLOLAAN PELAYARAN					
				Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	43,28	43,28	40,86	47,39	115,98
				Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75	12,50	25	25	100,00
				Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	59,38	64,43	60,67	94,16

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
					Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1	-	2	-	-	-
					Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjava (trip)	52	32	-	-	-
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						
					Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru)	50	62	10	22	220,00
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan bongkar muat barang (org)	320	80	-	-	-
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan Depo Peti Kemas; (org)	80	0	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan jasa pengurusan transportasi di perairan; (org)	1500	0	-	-	-
					Appraisal KMC. Kartini I (Paket)	-	1	-	-	-
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP	60	12	12	12	100,00
					Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP	120	30			
					Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit)	24	8	9	9	100,00
					Pembanguna Plengsengan Sungai	6	0	-	-	-
					Jumlah alat keselamatan ASDP	150	115	-	-	-
2	15	03	1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						
					Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan),	70	21	14	14	100,00
					Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku),	50	15	10	10	100,00
					Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok)	15	4	2	2	100,00
					Jumlah Pengembangan Pelabuhan Regional (Lok)	15	0			
					Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok)	10	2	2	2	100,00
					Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring	5	2	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		buoy (lok)							
		Jumlah Pemeliharaan SBNP (lok),	5	1	-	-	-		
		Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran (lok),	9	1	-	-	-		
2	15	04		PENGELOLAAN PENERBANGAN					
				Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	100	20,00	33,33	33,33	100,00
2	15	04	1.01	Penyelenggaraan Kebandarudaraan					
				Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi)	3	0	1	1	100,00
				Jumlah Pelaksanaan publikasi larangan penerbangan balon udara di Jawa Tengah (lok)	50	12			
				Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket)	7	1	2	2	100,00
2	15	05		PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
				Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	4,55	9,09	9,09	100,00
2	15	05	1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					
				Early Warning System (lok)	10	1	1	1	100,00
				Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	12	6	6	6	100,00
				Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	20	8	4	4	100,00
				Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA (Lok)	4	1	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang (lok)	15	3	-	-	-
		Jumlah Pengadan Gazon di perlintasan Sebidang (bh)	500	208	-	-	-
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang (Kab/Kota)	35	13	-	-	-

Sumber : Hasil Evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan :

1. Kolom (2) dan (3) diisi tentang program dan kegiatan sesuai dengan perubahan Renja PD Tahun 2021;
2. Kolom (4) diisi target kinerja program Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah (murni);
3. Kolom (6) diisi target kinerja sesuai perubahan Renja PD Tahun 2021.

Tabel 2.2

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X						
X	XX					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Kantor Dinas Perhubungan	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah I Kelas A	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah II Kelas B	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah III Kelas A	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah IV Kelas A	100	100,00	100,00
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah V Kelas B	100	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah VI Kelas A	100	100,00	100,00	100,00		
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Balai Transportasi Jawa Tengah	100	100,00	100,00	100,00		
X	XX	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	13	14	14	107,69
X	XX	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)		-	-			
X	XX	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	12	100,00
X	XX	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	12	100,00
X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	12	100,00
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	12	100,00
X	XX	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	-	-
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-
X	XX	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	12	100,00
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	12	100,00
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	12	100,00
X	XX	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	12	100,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	52,34	25,68	26,67	50,96
		Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	8,67	8,67	46,81
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	31,25	21,88	28,13	90,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50	35,00	40,00	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	43,75	50,00	80,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	19,23	23,08	60,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	53,85	61,54	80,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	20,69	27,59	80,01
		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	5,29	5,49	96,70
		Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	87,65	90,14	95,44
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	28,57	28,57	66,66
		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	23,19	23,19	53,01
		Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	100	58,33	58,33	58,33
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	52,41	52,41	99,81
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana	43,21	42,77	42,77	98,99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B						
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	51,20	51,20	98,40		
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	79,26	79,26	99,66		
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	66,12	66,12	99,53		
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	83,55	83,77	83,77	100,27		
		Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	31,92	31,92	91,60		
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				
				Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	1	1	1	100,00
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
				Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (Perlengkapan Jalan)	2502	2.252	2.274	90,89
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	10	7	9	90,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(lok)				
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Km)	8,75	7,75	8,25	94,29
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (lok)	10	7	8	80,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Km)	8,3	7,30	8,30	100,00
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (lok)	10	7	8	80,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Km)	9,45	8,45	10,05	106,35
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (lok)	10	5	6	60,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Km)	9,45	6,75	8,75	92,59
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	10	7	8	80,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Km)	7,75	7,25	8,75	112,90
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	10	6	8	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Km)	8,25	7,50	9,50	115,15		
		Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (Shelter)	210	165	165	78,57		
2	15	02	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
				Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (Terminal)	8,38	6,92	6,92	82,58
2	15	02	1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				
				Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Kali)	12	12	12	100,00
				Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi)	30	20	20	66,67
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (Kab/Kota)	18	18	18	100,00
2	15	02	1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				
				Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi (Dok)	119	95	95	79,83
2	15	02	1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
				Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang)	362	252	252	69,61
				Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (Kegiatan)	12	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kend)	431235	86.247	86.247	20,00
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	93485	18.697	18.697	20,00
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	3773340	754.668	754.668	20,00
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	350120	70.024	70.024	20,00
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	873310	174.662	174.662	20,00
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	760125	152.025	152.025	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		(Kend)						
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	4.189.401	4.088.901	4.088.901	97,60
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	8	8	8	100,00
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	4	4	4	100,00
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	22	22	22	100,00
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	6	6	6	100,00
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	8	8	8	100,00
				Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	10	10	10	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Bus)	112	98	98	87,50		
2	15	02	1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (trayek)	5	4	4	80,00
2	15	02	1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	-	-	-	-
2	15	02	1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (Perusahaan)	15	15	15	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (Kendaraan)	336	324	324	96,43
				Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I	502	497	511	101,79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Kelas A (Kend)						
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	286	280	293	102,45		
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	550	541	555	100,91		
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	873	869	882	101,03		
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	839	833	848	101,07		
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	1102	1.096	1.113	101,00		
2	15	02	1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (perusahaan)	15	15	15	100,00
2	15	02	1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	-	-	-	-		
2	15	03		PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75	37,50	37,50	50,00
				Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	43,28	49,25	49,25	113,80
				Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	66,96	78,39	89,29
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip/tahun)	52	14	14	26,92
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				
				Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (Perusahaan)	262	252	264	100,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				
				Jumlah pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Lokasi)	4	4	0	0,00
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (Lokasi)	4	3	3	75,00
2	15	05		PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
				Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	15,73	15,73	34,61
2	15	05	1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				
				Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	5,13	3,39	3,39	66,08
				Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	-	-	-	-

Sumber : Hasil Evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan : Program, kegiatan, indikator, dan target sesuai dengan Renja PD Tahun 2022

Dari rincian Tabel 2.2 tingkat capaian perkiraan realisasi indikator program Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra PD Tahun 2018-2023 (murni) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori tercapai ($\geq 100\%$), akan tercapai (60% - 99,99 %) dan perlu upaya keras (0% - 59,99%). Adapun dari 33 indikator program terdapat 6 indikator yang perlu upaya keras/kritis, indikator tersebut :

1. Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 23,19% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 43,75% dengan tingkat capaian 53,00%;
2. Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 15,73% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 45,45% dengan tingkat capaian 34,61%;
3. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 25,68% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 52,34% dengan tingkat capaian 49,06%;
4. Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 37,50% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 75,00% dengan tingkat capaian 50,00%;
5. Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 58,33% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100,00% dengan tingkat capaian 58,33%;
6. Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan diperkirakan sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 8,67% sedangkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2023 sebesar 18,52% dengan tingkat capaian 46,81%;

Indikator-indikator yang perlu upaya keras/kritis di atas disebabkan karena adanya penundaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain peningkatan Terminal Tipe B 6 Lokasi (Madureso, Purbalingga, Purwodadi, Pilangsari, Gagakrimang dan Penggaron), Pembangunan Terminal Tipe B di 1 Lokasi (Kutoarjo) dan pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Perlintasan Sebidang JPL 251 130+530 Kabupaten Klaten; realokasi anggaran pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi, penanganan daerah rawan kecelakaan, pembangunan plengsengan dermaga sungai, fasilitasi proyek strategis Pemerintah Pusat utamanya berkaitan dengan Perpres 79/2019 pada Tahun 2020 dan 2021 untuk penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan

Pemerintah Pusat yaitu penundaan kegiatan Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor Tahun 2020 dan 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021 kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah sebesar 37,08% dari target 36,31% sehingga tingkat capainnya 102,12%. Berikut rincian capaian masing – masing sasaran :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi sebesar 43,38% dari target 42,64% sehingga tingkat capainnya 101,74%;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi sebesar 21,18% dari target 19,62% sehingga tingkat capainnya 107,95%;
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal sebesar 46,67% dari target 46,67% sehingga tingkat capainnya 100,00%.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada level program dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
2	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Kantor Dinas Perhubungan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
3	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah I Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
4	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah II Kelas B			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
5	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah III Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
6	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah IV Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah V Kelas B			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
8	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah VI Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
9	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Balai Transportasi Jawa Tengah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
10	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang			29,14	42,85	52,34	25,06	26,67	32,69	43,10	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Tidak Tercapai Karena masih terdapat kebutuhan Anggaran Rp.16.600.000.000,-
11	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan			10,84	14,63	18,52	3,89	8,90	12,99	17,08	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Tidak Tercapai karena selama Tahun 2020 s.d 2021 kegiatan ditiadakan sesuai dengan Surat dari Pemerintah Pusat
12	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			18,75	25,00	31,25	21,88	28,13	31,25	37,50	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
13	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas			30,00	40,00	50	35,00	40,00	50,00	60,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	B										
14	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			37,50	50,00	62,50	43,75	50,00	62,50	75,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
15	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			23,08	30,77	38,46	19,23	23,08	38,46	46,15	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
16	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			61,54	61,54	76,92	53,85	61,54	76,92	92,31	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
17	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			20,69	27,59	34,48	20,69	27,59	34,48	41,38	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
18	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM			5,34	5,49	5,68	5,14	5,49	5,68	5,83	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
19	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru			86,00	90,14	94,45	85,63	90,14	94,45	98,76	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
20	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis			33,33	38,10	42,86	28,57	28,57	42,86	47,62	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
21	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan			31,25	37,50	43,75	21,88	28,13	43,75	53,13	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis			60,00	80,00	100	33,33	46,67	100,00	100,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
23	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			51,18	52,00	52,51	51,59	52,41	52,51	53,03	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
24	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			41,02	42,34	43,21	41,46	42,77	43,21	44,09	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
25	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			50,28	51,20	52,03	50,28	51,20	52,03	52,86	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
26	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			78,53	79,17	79,53	79,26	79,26	79,53	79,89	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
27	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			65,17	65,96	66,43	65,88	66,12	66,43	66,90	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
28	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			82,87	83,09	83,55	83,77	84,00	84,23	84,68	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Melebihi Target Renstra Murni karena peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi			31,60	33,55	34,85	31,92	31,92	36,48	36,48	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Melebihi Target Renstra Murni karena terdapat penambahan 3 armada Koridor Semarang-Bawen Tahun 2020 (Load Faktor 97%)
30	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang			50,00	62,50	75	25,00	37,50	75,00	87,50	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
31	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin			39,55	41,42	43,28	47,39	49,25	51,12	52,99	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Melebihi Target Renstra Murni karena adanya Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin
32	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa			73,26	78,39	87,79	60,67	78,39	87,79	92,66	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
33	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api			27,27	36,36	45,45	9,09	17,88	45,45	54,55	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni Dapat Tercapai

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan :

- Kolom (2) diisi indikator program;
- Kolom (5) diisi target kinerja program sesuai dengan Renstra PD (murni);
- Kolom (6) dan (7) diisi target kinerja program Renstra PD (murni);
- Kolom (8) diisi realisasi capaian kinerja program Tahun 2021;
- Kolom (9), (10) dan (11) diisi perkiraan capaian kinerja program Tahun 2022, 2023 dan 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Perhubungan yang memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
 3. Pelaksanaan dan evaluasi pelopran Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
 4. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
-
1. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menunjang Pusat Kegiatan Nasional / Pintu Gerbang Nasional dimana sebagai pendukung perekonomian pulau Jawa Bagian Utara dan Selatan ditunjang dengan adanya Jalan arteri Primer, Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan. Serta pendukung pergerakan orang atau barang di 3 (tiga) wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di sektor pertanian, industri dan pariwisata.

Sampai dengan Tahun 2021 tingkat capaian kinerja indikator program terhadap target akhir Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (murni), terdapat 6 indikator yang perlu upaya keras/kritis yaitu : Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan; Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api; Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi; dan Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan.

Koordinasi dan sinergitas program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

a. Koordinasi dan sinergitas program antar Perangkat Daerah Provinsi diantaranya :

- 1) Optimalisasi peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mendukung peningkatan keselamatan pada Ruas Jalan Provinsi melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pelajar pelopor;
- 3) Koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- 4) Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan Jasa Pengurusan Transportasi di Bidang Pelayaran.

b. Koordinasi dan sinergitas program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di antaranya pada saat rencana penyediaan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) sebagai dukungan pada sektor Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian, dan Perdagangan.

c. Koordinasi dan sinergitas program dengan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat

Koordinasi yang dilakukan yaitu mensinkronkan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan *Major Project* pada RPJMN 2020-2024 sektor transportasi antara lain berupa :

- 1) Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penanganan infrastruktur kewenangan pusat diantaranya Reaktivasi Jalur Kereta Api Non Aktif dan

- penyelesaian proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 2) Rapat-rapat koordinasi dan FGD untuk mendorong program/kegiatan dalam Perpres 79 Tahun 2019;
 - 3) Koordinasi dengan Kementerian Dalam negeri terkait penyelesaian proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dan rencana PPK BLUD dalam pengelolaan Trans Jateng;
 - 4) Fasilitasi pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan;
 - 5) Fasilitasi pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan Pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Bidang Lalu Lintas Jalan

- 1) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan;
- 2) Masih rendahnya Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan.

Hambatan :

- 1) Belum semua Ruas Jalan Provinsi terdapat Jaringan Tegangan Rendah (JTR) untuk pemasangan LPJU dan bahu jalan untuk pemasangan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
- 2) Para pengusaha angkutan umum belum menerapkan sepenuhnya Majamenen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan semakin mudahnya dalam kepemilikan sepeda motor.

b. Bidang Angkutan Jalan

- 1) Masih adanya Angkutan AKDP yang tidak sesuai SPM;
- 2) Masih adanya trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perintis yang belum terlayani;
- 3) Masih rendahnya pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Hambatan :

- 1) Para pengusaha angkutan umum belum menerapkan sepenuhnya Majamenen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan rendahnya *Load Factor* angkutan umum akibat pandemi;
- 2) Kurang kondusifnya jalur trayek angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perintis (Penolakan pengusaha angkutan umum eksisting dalam pengembangan angkutan

aglomerasi perkotaan serta kurangnya fasilitas keselamatan jalan pada daerah perbatasan) ;

- 3) Adanya kemudahan aksesibilitas menggunakan kendaraan pribadi dengan adanya Jalan Toll.

c. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

- 1) Masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan di Terminal Penumpang Tipe B;
- 2) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api;
- 3) Masih kurangnya simpul dan layanan transportasi strategis di Jawa Tengah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat;

Hambatan :

- 1) Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;
- 2) Belum semua perlintasan sebidang Kereta Api dengan Ruas Jalan Provinsi terdapat bahu jalan untuk pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dan dinamika rencana pembangunan Jalur KA (reaktivasi dan double track) dikarenakan semua jalur KA merupakan jalur KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- 3) Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

d. Bidang Pelayaran

- 1) Belum semua dermaga penyeberangan sungai dipasang lampu penerangan dermaga;
- 2) Belum siapnya (pendanaan, SDM dan struktur organisasi) untuk proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 3) Masih rendahnya Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan Perairan yang berizin.

Hambatan :

- 1) Data batas-batas sempadan sungai untuk pemasangan lampu dermaga sungai belum tersedia;
- 2) Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai;
- 3) Belum semua Perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan diperairan yang memahami perijinan

e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Sejateng

- 1) Masih rendahnya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan;

- 2) Belum semua Perusahaan Angkutan Umum berbadan Hukum di masing-masing Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan.

Hambatan :

- 1) Data Kecelakaan dari Kepolisian terkait dengan lokasi dan penyebabnya belum detail;
- 2) Para pengusaha angkutan umum belum menerapkan sepenuhnya Majamenen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan rendahnya *Load Factor* angkutan umum akibat pandemi.

f. Balai Transportasi Jawa Tengah

Pelayanan angkutan umum massal (utamanya memperbaiki Headway) belum optimal;

Hambatan :

Kondisi lalu lintas pada rute yang dilayani Trans Jateng sulit diprediksi dengan adanya pengalihan arus dan perbaikan infrastruktur jalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

- a. Sasaran pembangunan daerah pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah tercapai;
- b. Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode Tahun 2018 – 2023 Ke-7 Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi terwujud,
- c. Program kegiatan yang ada dalam mendukung SDGs :

- 1) Goal 9 : “Membangun insfratraktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dengan target mengembangkan insfratsruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk insfratraktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembanungan ekonomi dan pengembangan wilayah terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
a)	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	1034,030 Km	1053,765 Km
b)	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	PM	14 Pelabuhan

- a) Sampai dengan Tahun 2021 terealisasi 1.053,765 km/sp terdiri dari 878,155 km/sp jalur eksisting dan

175,61 km/sp jalur rencana yang teralisasi (Jalur ganda lintas selatan Purwokerto-Kutoarjo 103 km/sp, Solo-Kedungbanteng 44 km/sp, KA Bandara Adi Sumarmo 13,5 km/sp, Semarang-Demak-Rembang 0 km/sp, Purwokerto-Wonosobo 0 km/sp, Kedungjati-Tuntang-ambarawa-Magelang 5,11 km/sp, Rendegan-Sikampung 10 km/sp dan KSPN Borobudur 0 km/sp);

- b) Jumlah Pelabuhan strategis di Provinsi Jawa Tengah 11 pelabuhan : Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang (pelabuhan utama), Pelabuhan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Tegal (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Batang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Kendal (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Jepara (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Karimun Jawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Legon Bajak di Karimunjawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Juwana (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Sluke di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional, dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu : Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pemalang serta Pelabuhan Pekalongan.

- 2) Goal 11 : “Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif aman tangguh dan berkelanjutan terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	PM	10,33 %

- a) Persentase pengguna moda transportasi pada Tahun 2021 di Kota Magelang 27%, Kota Surakarta 7 %, Kota Salatiga 3%, Kota Semarang 1%, Kota Pekalongan 8% dan Kota Tegal 16%;
- b) Sedangkan Persentase pengguna Angkutan Umum Trans Jateng di Wilayah Pengembangan Kedungsepur 29,32%, Barlingmascakeb 9,27%, Subosukawonosraten 4,79% dan Purwomanggung 12,32%.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :

- a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
 - 1) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor;
 - 2) Koordinasi dengan pihak lain (Kementerian, POLRI, BUMN) belum optimal;
 - 3) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keselamatan transportasi;
 - 4) Kurangnya pemahaman pengusaha transportasi eksisting yang berhimpitan dengan rencana pelayanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
 - 5) Rencana Pemerintah Pusat dalam mengembangkan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang;
 - 6) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perhubungan semakin tinggi
- b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
 - 1) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis wilayah dan ditetapkannya KSPN dan KSP di Jawa Tengah;
 - 2) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau;
 - 3) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis di wilayah Jawa Tengah diantaranya Kedungsapur, Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Purwomanggung, selain Banglor, Wanarakuti, Petanglong dan Bergasmalang;
 - 4) Adanya layanan transportasi massal perkotaan yang dapat digunakan sebagai *Feeder*.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
Konektivitas antar wilayah pengembangan	Pengembangan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional dan pembukaan koridor baru) pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten;	a. Operasional BRT Trans Jateng di Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Purwomanggung (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga,

		<p>Solo-Sumberlawang Via Sangiran, Kutoarjo-Borobudur dan Semarang Gubug);</p> <p>b. Pembukaan koridor baru di Wilayah Pengembangan Subosukawonostraten (Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri)</p>
Simpul Transportasi	Melaksanakan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (peningkatan dan pembangunan) untuk mendukung Kawasan strategis diantaranya pada PKW promosi, Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata	<p>a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap III</p> <p>b. Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Banyuputih Tahap II di Kabupaten Batang, Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara dan Pracimantoro, Jatisrono serta Purwantoro di Kabupaten Wonogiri;</p>
Optimalisasi Ruang pergerakan	Fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah	<p>a. Fasilitasi peningkatan Terminal Tipe A Bulupitu, Bobotsari, Tegal dan Tingkir;</p> <p>b. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas;</p> <p>c. Fasilitasi Reaktivasi Jalur KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas;</p> <p>d. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan;</p> <p>e. Fasilitasi pembangunan jalur KA <i>Elevated</i> antara Solo-Balapan-Kadipiro (Simpang Joglo).</p>
Peningkatan Keselamatan	<p>a. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi;</p> <p>b. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi pada</p>	<p>a. Pengadaan dan <i>Early Warning System</i> di perlintasan sebidang KA Kabupaten Sragen;</p> <p>b. Pengadaan dan pemasangan LPJU Ruas Jalan Provinsi Purwodadi -</p>

	<p>Kawasan strategis utamanya Industri;</p> <p>c. Pemenuhan standar keselamatan pada dermaga sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>	<p>Klambu / Bts. Kab. Kudus dan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan</p> <p>c. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dermaga Lintas Desa Sangkrah-Desa Dading (Sisi Kota Surakarta- Sisi Kab. Sukoharjo)</p>
--	--	--

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan proses-proses sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.

Proses ini dilakukan agar program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dapat teridentifikasi. Program dan kegiatan prioritas diidentifikasi dan diarahkan sebagai upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Hasil Identifikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasionalisasi 6 koridor lama (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumber Lawang Via Sangiran dan Semarang-Gubug) dan pembukaan 1 koridor baru (Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri); peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 6 terminal, yaitu Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo Tahap III dan rehabilitasi terminal utamanya pada Terminal Banyuputih Tahap II Kabupaten Batang, Terminal Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara serta Terminal Pracimantoro, Jatisrono dan Purwantoro Kabupaten Wonogiri; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan provinsi terutama pada ruas perbatasan antar provinsi DIY, jalan akses pendukung kawasan pariwisata, jalan alternatif sejajar pantura, dan ruas strategis lainnya yaitu di Ruas Jalan Provinsi sebanyak 250 Unit di Ruas Jalan Purwodadi - Klambu / Bts. Kab. Kudus (30 Unit), Pati -

Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan (30 Unit), Wiradesa-Kalibening/Bts.Kab. Banjarnegara (20 Unit), Purwodadi-Geyer/Bts.Kab.Sragen (15 Unit), Randudongkal-Belik/Bts Kab.Purbalingga (15 Unit), Purworejo-Sibolong/Bts. DIY (30 Unit), Karangwuni-Cawas-Jentir/Bts. DIY (30 Unit), Semarang-Godong (30 Unit), Slawi-Jatibarang/Bts. Kab. Brebes (20 Unit), Jatinegaran/Bts.Kab.Pemalang-Slawi (20 Unit) dan KESESI / Bts. Kab. Pekalongan – Bantarbolang (10 Unit) serta serta retrofit/perbaiki lampu yang rusak untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal (lintas penyeberangan Lutungmati - Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo), serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai Bengawan Solo lintas Surakarta - Sukoharjo (lintas penyeberangan Sangkrah - Gadingan); kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan; kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa (proses scrapping).

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan

rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (*Early Warning System/EWS*) sebanyak 7 Unit di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Grobogan, serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif.

2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan :

Pada rancangan awal RKPD terdapat 4 Program dan 26 Kegiatan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan menurut daftar skala prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Perbandingan diantaranya :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya, kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasionalisasi 6 koridor lama dan pembukaan 1 koridor baru (Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri beroperasi 5 Bulan); Kegiatan peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 6 terminal yaitu rehabilitasi terminal di Kabupaten Batang, Banjarnegara dan Wonogiri serta Pembangunan Tahap III Terminal Kutoarjo Purbalingga (Pembangunan Terminal Kutoarjo belum bisa selesai di Tahun 2023 sebagaimana rancangan awal RKPD namun Pembangunan dilakukan dengan pemenuhan fasilitas utama sehingga terminal dapat siap operasional pada tahun 2023); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan (Proyeksi Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang tidak tercapai karena masih terdapat kebutuhan anggaran);

b. Pengelolaan Pelayaran

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal (lintas penyeberangan Lutungmati -

Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo) serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai Bengawan Solo lintas Surakarta - Sukoharjo (lintas penyeberangan Sangkrah - Gadingan); kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional (penyesuaian anggaran sebagai antisipasi penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan (penyesuaian anggaran sebagai antisipasi penyelesaian proses P3D dan transisinya); Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan yaitu kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang - Karimunjawa (proses scrapping).

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya, diantaranya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (*Early Warning System/EWS*) sebanyak 7 Unit di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Grobogan (penyesuaian anggaran sesuai dengan kriteria *Early Warning System/EWS pada single track dan double track*).

3. Catatan Penting terkait rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan :

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Diperkirakan sampai dengan Tahun 2023 target Renstra 2018-2023 (Murni) 2 indikator kinerja program tidak tercapai, yaitu :

- 1) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang;
- 2) Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan;

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				72.350.758	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				68.560.758	
		Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	67.917.106		Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	63.305.408	-Penundaan pemeliharaan gedung kantor -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia
		Kota Semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	600.340		Kota Semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	118.840	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Penggaron Kota Semarang, Terminal Purwodadi Kab. Grobogan dan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Terminal Bintoro Kab.Demak -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia
		Pati	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	223.612		Pati	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	92.112	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Gagak Rimang Kab. Blora -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia
		Kota Surakarta	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	1.443.100		Kota Surakarta	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	376.600	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Penggung, Terminal Pilangsari Kab.Sragen, Terminal Kartosuro Kab.Sukoharjo, Terminal Sukoharjo Kab. Sukoharjo, Terminal Tegalgede, Terminal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Tawangmangu Kab. Karanganyar, Terminal Baturetno Kab. Wonogiri -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia
		Kota Magelang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	409.700		Kota Magelang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	128.200	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Madureso, Terminal Dr. Prayitno Muntilan -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia
		Banyumas	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	249.500		Banyumas	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	118.000	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Purbalingga -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran yang tersedia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	673.400		Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	141.900	-Penundaan pemeliharaan rutin Terminal Kajen Kab. Pekalongan, Terimal Tanjung Kab. Brebes dan Terminal Bumiayu Kab. Brebes -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia
		Kota Semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	434.000		Kota Semarang	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100	434.000	
		Kota Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	400.000		Kota Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	400.000	
2	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				184.706.698	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				128.749.179	
		Wonogiri, Rembang, Purworejo, Klaten,	Persentase fasilitas perlengkapan	52,34	21.917.045		Purwodadi, Pati, Kab. Pekalongan, Pemalang,	Persentase fasilitas perlengkapan	52,34	7.317.436	- Target dan kebutuhan anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Karanganyar, Magelang, Wonosobo, Blora, Kota Semarang, Purwodadi, Pati, Brebes, Kab. Semarang	jalan terpasang				Purworejo, Klaten, Grobogan, Kab. Tegal,	jalan terpasang			menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan Provinsi Purwodadi - Klambu / Bts. Kab. Kudus dan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan, Wiradesa-Kalibening/ Bts.Kab. Banjarnegara , Purwodadi-Geyer/ Bts.Kab.Sragen, Randudongkal-Belik/Bts Kab.Purbalingga, Purworejo-Sibolong, Karangwuni-Cawas-Jentir/Bts. DIY, Semarang-Godong, Slawi-Jatibarang/Bts. Kab. Brebes, Jatinegaran/ Bts.Kab.Pemalang-Slawi, KESESI / Bts. Kab. Pekalongan -

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Bantarbolang -Proyeksi target tidak tercapai. dengan perkiraan realisasi sebesar 32,69% dengan tingkat capaian 62%
		Kota Semarang	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	235.000		Kota Semarang	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	235.000	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Pelaksanaan Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor dipadatkan semula 3 Hari menjadi 1 Hari - Proyeksi target tidak tercapai. dengan perkiraan realisasi sebesar 12,99% dengan tingkat capaian 70,15%
		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan	31,25	2.143.875		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan	31,25	876.280	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Wilayah I Kelas A					Wilayah I Kelas A			
		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50	2.146.555		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50,00	840.980	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan pemenuhan perelengkapan jalan prioritas
		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	2.178.715		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	949.880	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan pemenuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											perelengkapan jalan prioritas
		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	2.162.635		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	1.113.880	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan pemenuhan perelengkapan jalan prioritas
		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	2.146.555		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	843.480	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan pemenuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											perelengkapan jalan prioritas
		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	2.135.835		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	862.180	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi -Target tetap tercapai dengan mengoptimalkan pemenuhan perelengkapan jalan prioritas
		Jawa Tengah	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	50.000		Jawa Tengah	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	50.000	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning)
		Jawa Tengah	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	1.590.000		Jawa Tengah	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	1.540.000	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning); -Mengakomodir posko pada waktu kondisi lalu lintas tinggi (libur panjang)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jawa Tengah	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	255.000		Jawa Tengah	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	230.000	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Fokus sosialisasi rencana pembukaan koridor baru Solo-Wonogiri Tahun 2023
		Purworejo,Batang, Banjarnegara, Wonogiri	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	41.112.429		Purworejo,Batang, Banjarnegara	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	7.562.129	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Pembangunan Terminal Kutoarjo belum bisa selesai di Tahun 2023 (dalam rencana awal direncanakan selesai di tahun 2023)
		Jawa Tengah	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	100	400.000		Jawa Tengah	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	100,00	600.000	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Kegiatan untuk Fasilitasi Perpres 79/2019 dan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											review RIJLLAJ
		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan, Salatiga	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	140.625		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan, Salatiga	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	210.625	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan posko angkutan lebaran dan natarau dengan kondisi lalu lintas normal pasca covid
		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	90.750		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	115.950	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan posko angkutan lebaran dan natarau dengan kondisi lalu lintas normal pasca covid
		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	52,03	241.250		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	52,03	404.650	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan posko angkutan lebaran dan natarau dengan kondisi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perhubungan Wilayah III Kelas A					Perhubungan Wilayah III Kelas A			lalu lintas normal pasca covid
		Purworejo, Magelang, Kota Magelang, Temanggung	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	130.000		Purworejo, Magelang, Kota Magelang, Temanggung	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	197.800	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan lebaran dan natarau dengan kondisi lalu lintas normal pasca covid
		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	195.500		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	195.500	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan posko angkutan lebaran dan natarau dengan kondisi lalu lintas normal pasca covid
		Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Batang	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai	83,55	201.990		Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Batang	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai	84,23	251.990	-Target menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Menyesuaikan kebutuhan posko

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A					Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			angkutan lebaran dan natarau dengan kondisi lalu lintas normal pasca covid
		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	105.232.939		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	104.351.419	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) -Operasional pembukaan koridor baru (Solo-Sukoharjo-Wonogiri) selama 3 Bulan
3	PENGELOLAAN PELAYARAN				5.024.216	PENGELOLAAN PELAYARAN				3.404.216	
		Batang, Kendal, Surakarta, Sukoharjo	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75	3.227.000		Batang, Kendal, Surakarta, Sukoharjo	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75,00	1.537.000	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) - Pemenuhan pembangunan dermaga dan Lampu dermaga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jawa Tengah	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	43,28	65.000		Jawa Tengah	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	51,12	135.000	-Peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam pembaharuan maupun perubahan izin perusahaan JPT angkutan laut dengan adanya Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin - penyesuaian anggaran sebagai antisipasi penyelesaian proses P3D dan transisinya
		Jepara, Semarang	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	1.732.216		Jepara, Semarang	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	1.732.216	-KMC Kartini I dalam proses penghapusan aset
4	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				5.186.024	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				3.398.751	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pekalongan, Cilacap, Sragen, Sukoharjo, Grobogan, Brebes, Blora	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	5.186.024		Sragen	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	3.398.751	-Target dan kebutuhan anggaran menyesuaikan Renstra 2018-2023 (eplanning) - pengadaan dan pemasangan EWS di 7 lokasi - Target dapat tercapai namun terdapat penyesuaian anggaran sesuai dengan kriteria Early Warning System/EWS pada single track dan double track
	JUMLAH				267.267.696	JUMLAH				200.667.206	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan : Rancangan awal RKPD Tahun 2023 memuat program, belum kegiatan. Oleh karena itu dalam tabel ini yang dituangkan dan dianalisis hanya sampai program dan indikator kinerja yang dibandingkan dengan usulan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Perangkat daerah Kabupaten/ Kota diperoleh dari pelaksanaan Musrenbangwil, Forum PD, Reses DPRD dan Usulan Masyarakat yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Usulan Program dan Kegiatan yang diakomodir Dinas Perhubungan merupakan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selaras dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, serta sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Penyediaan sarana transportasi di daerah perbatasan, pedesaan dan pinggiran di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target indikator program salah satunya Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis, aktivitas kegiatan tersebut berupa fasilitasi angkutan perintis di Jawa Tengah. • Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.
2	Penindakan kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan <i>Trucking</i> yang angkutan barangnya melebihi tonase	Jawa Tengah	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi , dengan Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi. dimana forum tersebut untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara lintas kelembagaan dengan keluaran Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ. • Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.
3	Pengadaan dan pemasangan LPJU	Ruas Jalan Balekambang-Kaliwiro	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	-	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Ruas Jalan tersebut merupakan Ruas Jalan Kabupaten. • Diusulkan Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto, Wonosobo.
4	Pengadaan perlengkapan jalan	Sukorejo -	Persentase fasilitas	471 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	berupa alat penerangan jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kendal	Platungan / Blimbing, Cangkiran - Boja – Sukorejo, Weleri - Patean / Bts. Kab. Temanggung	perlengkapan jalan terpasang		<p>Pada Tahun 2023 difokuskan pada ruas jalan strategis utamanya ruas perbatasan antar provinsi (DIY), jalan akses pendukung kawasan pariwisata, jalan alternatif sejajar pantura dengan lalu lintas tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028. • Diusulkan Bupati Kendal No. Surat 670/3439/2021 Tanggal 23 November 2021
5	Peningkatan peran Forum LLAJ	Kab. Pati	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	1Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron <p>Pada Tahun 2023 terdapat pelaksanaan Forum LLAJ sebanyak 6 kali .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
6	Pemasangan marka pada ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Pati	Kab. Pati	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron <p>Pada Tahun 2023 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati terdapat pengadaan marka 5.000 m’</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
7	Peremajaan Traffic Light	Simpang Bleber dan Simpang Randu Kuning	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	2Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron <p>Peremajaan Traffic Light pada Simpang Bleber dilakukan pada perubahan anggaran Tahun 2022.</p> <p>Pada Tahun 2023 alokasi pengadaan dan pemasangan Traffic Light pada simpang gabungan Kabupaten Sragen dan Simpang Empat Bangsri, Kabupaten Jepara yang merupakan simpang prioritas karena potensi kecelakaan dengan lalu lintas tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2023
8	Angkutan Aglomerasi Pati-kudus-jepara	Pati-kudus-jepara	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	1 Koridor	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 difokuskan untuk Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten. Pada Wilayah Pengembangan Wanarakuti belum disusun masterplan pengembangan angkutan aglomerasi selain itu medan dan kondusifitas wilayah yaang kurang memungkinkan. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
9	Pemasangan ATCS di simpang empat gor, randukuning dan bleber di Kota Pati	simpang empat gor, randukuning dan bleber	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	3 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Pada Tahun 2023 tidak ada alokasi pengadaan dan pemasangan ATCS. Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pengadaan ATCS/ITS belum menjadi prioritas karena fokus terhadap pemasangan APILL Konvensional dan APILL untuk penanganan DRK. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
10	Mengusulkan pemasangan TL Simpang 4 Sucen (Jl.Pahlawan)	Kab. Purworejo	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Pada Tahun 2023 alokasi pengadaan dan pemasangan Traffic Light pada simpang gabungan Kabupaten Sragen dan Simpang Empat Bangsri, Kabupaten Jepara yang merupakan simpang prioritas karena potensi kecelakaan dengan lalu lintas tinggi. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Purworejo pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Penanganan DRK Kalijambe	Kab. Purworejo	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	1 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Pada Tahun 2023 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang terdapat penanganan DRK 1 Lokasi. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Purworejo pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
12	Penambahan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya di Jl Provinsi di wilayah Kab.Purworejo	Kab. Purworejo	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	1 Paket	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengadakan 250 Unit LPJU dimana 30 Unit di Kabupaten Purworejo (Jl. PURWOREJO - SIBOLONG / Bts. PROV. DIY Lanjutan) dan 350 Buah Rambu (pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas mendukung kawasan perbatasan antar Kabupaten / Kota / Provinsi, Kawasan Wisata, Jalur Alternatif, dan Kegiatan Ekonomi Lokal). • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Purworejo pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
13	Pengembangan rute Trans Jateng koridor Purworejo-Dieng lewat Jalan Provinsi	Kab. Purworejo	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	1 Koridor	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 difokuskan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung Koridor Kutoarjo-Borobudur. Untuk koridor Purworejo-Dieng belum masuk karena menyesuaikan dengan skala prioritas. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Purworejo pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
14	Pengembangan aglomerasi di wil. Pekalongan	Kab. Pekalongan	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	1 Koridor	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Sinkron Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 difokuskan untuk Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb,

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>Purwomanggung dan Subosukawonosraten. Pada Wilayah Pengembangan Petanglong baru disusun masterplan pengembangan angkutan aglomerasi pada tahun 2022. Pada Wilayah Pengembangan Petanglong diusulkan dalam program Green Infrastructure Initiative (GII) yang merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
15	Mengusulkan optimalisasi pelaksanaan pengawasan kelaikan teknis maupun administrasi terhadap bus AKDP yang melintas di Wil Kab Pati secara terkoordinasi dengan Dishub	Kab.Pati	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	1 Kegiata	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Pada Tahun 2023 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati terdapat aktivitas pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan umum. • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Pati pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
16	Demi kenyamanan dan kepastian tarif angkutan bus AKDP ekonomi mohon tiap menjelang lebaran dilakukan pengawasan supaya tidak menaikkan tarif di atas yg ditentukan	Jawa Tengah	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1 Kegiata	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengadaan dan pengendalian angkutan lebaran. • Diusulkan LP2K pada acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja PD Tahun 2023
17	Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang 4 Gabungan Sragen	Kabupaten Sragen	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Sinkron Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengadaan dan pemasangan APILL

Sumber : Hasil Identifikasi Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional Tahun 2023 dalam RKP 2023 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas POLhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2023 mengacu pada Prioritas Nasional ke-5 (lima), Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Fokus utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2023 yaitu Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Terwujudnya Konektivitas Nasional , Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan sedangkan agenda prioritas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2023 yaitu pariwisata, logistik, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan pengembangan SDM sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Mendasarkan RKP 2023, Isu utama dan tantangan dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi dan musibah lainnya antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Masih banyaknya lokasi rawan kecelakaan (*Blackspot*) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistic;

3. Pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan yang sering menyebabkan kecelakaan;
4. Masih lambatnya penanganan korban kecelakaan termasuk di sejumlah lokasi rawan kecelakaan;
5. Kecelakaan kapal pada jalur utama pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi;
6. Upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan SDM, sarana, serta prasarana pencarian dan pertolongan.

Pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, isu terkait keselamatan transportasi juga masih mendapatkan perhatian, diantaranya :

1. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi;
2. Peningkatan peran Forum LLAJ melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);
3. Pengadaan dan pemasangan Lampu Dermaga Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi).

Isu utama dan tantangan dalam penyediaan transportasi perkotaan dalam RKP 2023 adalah belum tersedianya layanan angkutan umum massal yang efisien, efektif, murah, nyaman, dan tepat waktu, serta sesuai dengan kebutuhan mobilitas di wilayah kota metropolitan dan kota besar. Sementara, dalam pelaksanaan *Major Project* pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan masih menghadapi tantangan antara lain :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan sistem angkutan massal yang mengacu kepada upaya memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah metropolitan serta penyelenggaraan pelayanan integrasi antarmoda;
2. Belum terbentuknya kerangka kelembagaan yang memiliki kemampuan mengintegrasikan pengembangan dan penyelenggaraan transportasi perkotaan lintas wilayah administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan;
3. Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan;
4. Kerangka regulasi yang bersifat menyeluruh untuk penyediaan fasilitas dukungan pendanaan untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan di wilayah metropolitan.

Pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, penyediaan transportasi perkotaan juga masih menjadi perhatian penuh dengan dilanjutkannya operasional 6 (enam) koridor layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan pembukaan operasional koridor ke-7 Trans Jateng pada Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri yang diharapkan dapat operasional pada Tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran (4)	Satuan (5)	Target (6)
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah		Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	44,37
		Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Kepuasan Masyarakat		80
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat		80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		71

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta Musrenbangwil. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk untuk kebutuhan transportasi pelajar dan mahasiswa, buruh, dan veteran berupa operasionalisasi 6 (enam) koridor lanjutan (Kota Semarang - Kabupaten Semarang, Kota Semarang - Kendal, Kota Semarang - Grobogan, Banyumas - Purbalingga, Purworejo - Kabupaten Magelang, Surakarta - Sragen) dan pembukaan 1 (satu) koridor baru (Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri); kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo Purworejo (Tahap III), peningkatan Terminal Banyuputih Batang (Tahap II), peningkatan Terminal Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara, peningkatan terminal di Kabupaten Wonogiri (Terminal Pracimantoro, Terminal Jatisrono, dan Terminal Purwantoro); peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 250 Unit, Pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 350 buah, pengadaan dan pemasangan RPPJ sebanyak 29 buah, pengadaan dan pemasangan APILL sebanyak 2 buah, pengadaan dan pemasangan Warning Light sebanyak 10 buah yang difokuskan pada ruas jalan provinsi terutama pada ruas perbatasan antar provinsi DIY, jalan akses pendukung kawasan pariwisata, jalan alternatif sejajar pantura, dan ruas strategis lainnya, serta retrofit/perbaiki lampu yang rusak sebanyak untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat.

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi; persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis; persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan; persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; persentase rehabilitasi daerah rawan kecelakaan (pada

semua balai); persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (pada semua balai); persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM; persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan; dan persentase fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis.

b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal (lintas penyeberangan Lutungmati - Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo), serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai Bengawan Solo lintas Surakarta - Sukoharjo (lintas penyeberangan Sangkrah - Gadingan) sebanyak 3 unit; kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally mandiri*, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan; kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang - Karimunjawa (proses scrapping).

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; dan persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (*Early Warning System/EWS*) sebanyak 7 Unit di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Grobogan, serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan

jalan rel kereta api non aktif. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang kereta api.

Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023 (4)	2024 (5)	2023 (6)	2024 (7)
			59,50	62,52	135.552.146.000	194.469.288.000
			51,45	56,27	17.974.867.000	42.106.589.000
2	15	02	52,34	43,10	7.317.436.000	20.979.395.000
2	15	02	4.252	5.991	6.281.325.000	20.739.075.000
2	15	02			6.281.325.000	20.739.075.000
			350	772	382.000.000	810.600.000
			29	94	273.825.000	838.950.000
			2	2	515.000.000	525.000.000
			10	16	272.500.000	420.000.000
			-	2	-	1.575.000.000
			250	853	4.838.000.000	16.569.525.000
			-	-	-	-
2	15	02			911.111.000	115.320.000
			42	18	60.000.000	46.320.000
			26	12	804.791.000	30.000.000
			18	32	46.320.000	39.000.000
2	15	02	21	18	60.000.000	46.320.000
2	15	02	6	6	804.791.000	30.000.000
2	15	02	18	6	46.320.000	39.000.000
2	15	02	119	137	125.000.000	125.000.000
2	15	02	24	24	125.000.000	125.000.000
			18,52	17,08	235.000.000	235.000.000
2	15	02			235.000.000	235.000.000
			362	459	200.000.000	200.000.000
			12	12	35.000.000	35.000.000
2	15	02			200.000.000	200.000.000
			35	92	70.000.000	70.000.000
			70	56	130.000.000	130.000.000
2	15	02			35.000.000	35.000.000
			-	-	-	-
			20	20	35.000.000	35.000.000
			31,25	37,50	876.280.000	2.205.075.000
2	15	02	10	38	876.280.000	2.205.075.000
			10,25	37,50	466.280.000	352.000.000
2	15	02		38	410.000.000	1.853.075.000
			10.000	38	240.000.000	1.047.200.000
			30	125	170.000.000	656.250.000
			-	215	-	112.875.000
			-	7	-	36.750.000
			-	-	-	-
2	15	02			466.280.000	352.000.000
			50	20	275.000.000	112.000.000
			50	50	191.280.000	240.000.000
2	15	02	-	-	-	-
2	15	02	-	-	-	-
			50,00	60,00	840.980.000	2.214.955.000
2	15	02			840.980.000	2.214.955.000
			10	10	340.000.000	1.853.075.000
			10,05	8,30	500.980.000	361.880.000
2	15	02			340.000.000	1.853.075.000
			10.000	47.600	340.000.000	1.047.200.000
				125	-	656.250.000
				215	-	112.875.000
				7	-	36.750.000
				-	-	-
2	15	02			500.980.000	361.880.000
			55	20	302.500.000	112.280.000
			52	52	198.480.000	249.600.000
2	15	02	-	-	-	-
2	15	02	-	-	-	-
			62,50	75,00	949.880.000	2.333.515.000
2	15	02			949.880.000	2.333.515.000
			10	10	328.000.000	1.853.075.000
			11,45	9,45	621.880.000	480.440.000
2	15	02			328.000.000	1.853.075.000
			10.000	47.600	328.000.000	1.047.200.000
			-	125	-	656.250.000
			-	215	-	112.875.000
			-	7	-	36.750.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	60	20	621.880.000	480.440.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	76	76	284.880.000	364.800.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	46,15	1.113.880.000	2.274.235.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (lok)	10	10	1.113.880.000	2.274.235.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Km)	9,75	7,75	540.000.000	1.853.075.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	540.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	25	125	240.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	300.000.000	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	112.875.000
		jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	-	-	-	36.750.000
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	60	20	573.880.000	421.160.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	62	62	337.000.000	113.960.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	92,31	843.480.000	2.214.955.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	10	10	843.480.000	2.214.955.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Km)	9,75	8,25	370.000.000	1.853.075.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	370.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	370.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh)	-	-	-	36.750.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh)	-	-	-	-
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	50	20	473.480.000	361.880.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	52	52	275.000.000	112.280.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	41,38	862.180.000	2.175.435.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	10	10	862.180.000	2.175.435.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Km)	10,25	8,50	390.000.000	1.853.075.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	390.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	390.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	112.875.000
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	36.750.000
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	55	20	472.180.000	322.360.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	44	44	302.500.000	111.160.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
2 15 05	Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	54,55	3.398.751.000	5.247.024.000
2 15 05 1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	10	-	3.398.751.000	5.247.024.000
		Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	-	11,13	-	5.247.024.000
2 15 05 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Kegiatan)	-	-	3.398.751.000	-
2 15 05 1.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	4	-	877.024.000	5.247.024.000
		Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	3	4	242.000.000	877.024.000
		Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA (Lok)	-	6	-	484.000.000
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang (lok)	-	6	-	400.000.000
		Jumlah Pengadaan Gazon di perlintasan Sebidang (bh)	7	-	2.279.727.000	-
2 15 03	Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System (lok)	-	6	-	3.486.000.000
2 15 03 1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75,00	87,50	1.537.000.000	2.227.000.000
		Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (Lokasi)	6,00	6,00	1.317.000.000	2.077.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
2 15 03 1.10 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	30.000.000	30.000.000
2 15 03 1.10 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.240.000.000	2.000.000.000
		Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit)	3	-	75.000.000	-
		Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai (lokasi)	3	2	1.165.000.000	2.000.000.000
2 15 03 1.10 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				47.000.000	47.000.000
		Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP (Orang)	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (dokumen)	12	12	47.000.000	47.000.000
		Jumlah alat keselamatan ASDP (Buah)	-	-	-	-
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Lokasi)	3	4	220.000.000	150.000.000
2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				220.000.000	150.000.000
		Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan (Lok)	3	3	20.250.000	20.250.000
		Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku)	10	10	8.585.000	8.585.000
		Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok)	2	2	10.900.000	10.900.000
		Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Lok)	13	13	180.265.000	110.265.000
		Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan SBNP (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran (lok)	-	-	-	-
	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	60,38	64,61	13.225.860.000	41.129.760.000
2 15 02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	5,83	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (Kendaraan)	366	366	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000	50.000.000
		Jumlah Evaluasi Trayek AKDP (dokumen)	-	-	-	-
		Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan)	30	30	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	-	-	-	-
2 15 02 1.15 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi (Trayek)	-	-	-	-
		Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	98,76	1.540.000.000	1.590.000.000
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	4.406.000	4.406.000	1.450.000.000	1.500.000.000
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok)	28	28	1.450.000.000	1.500.000.000
2 15 02 1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (Perusahaan)	15	15	40.000.000	40.000.000
2 15 02 1.12 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				40.000.000	40.000.000
		Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok)	1	1	20.000.000	20.000.000
		Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan)	1	1	20.000.000	20.000.000
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (perusahaan)	15	15	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi				50.000.000	50.000.000
		Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan)	1	1	25.000.000	25.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek (Perusahaan)	15	15	25.000.000	25.000.000
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	47,62	230.000.000	280.000.000
2 15 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (trayek)	5	5	180.000.000	180.000.000
2 15 02 1.09 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.000.000	70.000.000
		Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng (Paket)	-	-	-	-
		Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal (Dok)	-	-	-	-
		Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok)	1	1	70.000.000	70.000.000
2 15 02 1.09 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				110.000.000	110.000.000
		Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi (Org)	300	300	110.000.000	110.000.000
		Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM (Lok)	-	-	-	-
2 15 02 1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	4	4	50.000.000	100.000.000
2 15 02 1.11 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis (Kali)	2	2	50.000.000	100.000.000
		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	53,13	7.562.129.000	36.112.429.000
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (terminal)	14,00	14	7.562.129.000	36.112.429.000
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)		1	4.617.429.000	100.000.000
		Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	1,00	100,00	4.517.429.000	300.000.000
2 15 02 1.03 02	Pembangunan Gedung Terminal				-	20.500.000.000
		Jumlah Pembangunan Terminal (Tahapan)	1	1	100.000.000	20.000.000.000
		Jumlah Pengadaan Tanah Terminal (Paket)			-	2.850.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal (Paket)	5	1	2.730.000.000	500.000.000
2	15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	-	-	-	15.477.729.000
		Jumlah Pengembangan Terminal (Terminal)	-	3	-	15.127.729.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV (Terminal)	5	-	120.000.000	-
		Jumlah Penerapan Sistem Informasi (Terminal)	-	-	34.700.000	-
		Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal (Paket)	4	3	34.700.000	350.000.000
2	15 02 1.03 5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	-	-	-	34.700.000
		Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Tipe B (Kali)	1	4	60.000.000	34.700.000
		Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Tipe B (Terminal)	100	-	600.000.000	-
2	15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	-	600.000.000	300.000.000
2	15 02 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			600.000.000	300.000.000
		Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (dok)	1	-	400.000.000	-
		Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis (Lok)	8	6	200.000.000	300.000.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	53,03	210.625.000	140.625.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	512	521	25.000.000	25.000.000
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			25.000.000	25.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	9	9	12.500.000	12.500.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	9	9	12.500.000	12.500.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	34.373	86.247	15.625.000	15.625.000
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	15.625.000	15.625.000
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8	8	170.000.000	100.000.000
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	4	4	170.000.000	100.000.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	44,09	115.950.000	90.750.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	296	305	20.000.000	20.000.000
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			20.000.000	20.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	6	6	10.000.000	10.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	6	6	10.000.000	10.000.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5.733	18.697	10.500.000	10.500.000
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	10.500.000	10.500.000
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	4	85.450.000	60.250.000
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2	2	85.450.000	60.250.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	52,86	404.650.000	241.250.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	564	573	40.850.000	40.850.000
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			40.850.000	40.850.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	10	10	20.000.000	20.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	10	10	20.850.000	20.850.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	108.405	754.668	50.400.000	50.400.000
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	50.400.000	50.400.000
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22	22	313.400.000	150.000.000
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	11	11	313.400.000	150.000.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	79,89	197.800.000	130.000.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	878	890	30.000.000	30.000.000
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	24.191	70.024	25.000.000	25.000.000
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	25.000.000	25.000.000
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8	6	142.800.000	75.000.000
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	4	3	142.800.000	75.000.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	66,90	195.500.000	195.500.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	845	860	30.000.000	30.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif		
			2023	2024	2023	2024	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	6	6	15.000.000	15.000.000	
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	6	6	15.000.000	15.000.000	
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	50.074	174.662	15.500.000	15.500.000	
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	365	365	15.500.000	15.500.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	8	8	150.000.000	150.000.000	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	4	4	150.000.000	150.000.000	
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	83,55	84,68	251.990.000	201.990.000	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	1.107	1.125	30.000.000	30.000.000	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000	
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000	
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	39.781	152.025	21.990.000	21.990.000	
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	365	365	21.990.000	21.990.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	10	10	200.000.000	150.000.000	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	5	5	200.000.000	150.000.000	
2 15 03	Pengelolaan Pelayaran	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	51,12	52,99	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (Perusahaan)	274	284	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (BAP)	50	50	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					-	-
		Jumlah Bintel Penyelenggaraan dan pengusaha jasa pengurusan transportasi di perairan; (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Bintel Penyelenggaraan dan pengusaha Depo Peti Kemas; (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Bintel Penyelenggaraan dan pengusaha bongkar muat barang (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Appraisal KMC. Kartini I (Paket)	-	-	-	-	-
		Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	92,66	1.732.216.000	1.732.216.000	
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip/tahun)	14	14	1.732.216.000	1.732.216.000	
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini I (Paket)	1	1	1.732.216.000	1.732.216.000	
	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67	66,67	104.351.419.000	111.232.939.000	
2 15 02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	36,48	104.351.419.000	111.232.939.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Bus)	107	112	102.730.399.000	109.132.939.000	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (koridor)	7	7	102.730.399.000	109.132.939.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (Shelter)	210	224	1.621.020.000	2.100.000.000	
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng (Paket)	2	2	1.621.020.000	2.100.000.000	
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	65.115.060.000	72.350.758.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	64.715.060.000	71.950.758.000	
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	63.305.408.000	67.917.106.000	
X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	48.113.502.000	52.303.200.000	
X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12	12	47.223.302.000	51.413.000.000	
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	820.200.000	820.200.000	
X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	12	12	70.000.000	70.000.000	
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	165.000.000	165.000.000	
X XX 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12	12	165.000.000	165.000.000	
X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	125.000.000	50.000.000	
X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	-	-	-	-	
X XX 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	20.000.000	20.000.000	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	20	20	105.000.000	30.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	2.148.000.000	2.061.000.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	-	-	-	-
		Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	1.760	800	88.000.000	40.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	50.000.000	50.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	165.000.000	126.000.000
X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	12	12	60.000.000	60.000.000
X XX 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	1.500.000.000	1.500.000.000
X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	3.000	3.000	60.000.000	60.000.000
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	-	105.000.000	-
X XX 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	-	-
X XX 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	-	-	-	-
X XX 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	-	-	-	-
X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
X XX 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	5	-	105.000.000	-
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	11.261.506.000	11.250.506.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12	12	1.811.000.000	1.800.000.000
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	9.446.506.000	9.446.506.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	1.387.400.000	2.087.400.000
X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12	12	687.400.000	687.400.000
X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	150.000.000	150.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)	2	8	300.000.000	1.000.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	100.000.000	100.000.000
X XX 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12	12	150.000.000	150.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	118.840.000	600.340.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	57.840.000	24.340.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	37.500.000	4.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	100	100	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	1.500.000	1.500.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	9.840.000	9.840.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	39.000.000	554.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)	1	3	35.000.000	550.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	92.112.000	223.612.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	47.112.000	13.612.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	35.500.000	2.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	60	60	3.000.000	3.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	1.000.000	1.000.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	5.612.000	5.612.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	36.000.000	201.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)	1	1	35.000.000	200.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	1.000.000	1.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	376.600.000	1.443.100.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Asn (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	121.400.000	87.900.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	44.500.000	11.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	240	240	12.000.000	12.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	11.000.000	11.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	5.500.000	5.500.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	48.400.000	48.400.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	43.200.000	43.200.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	43.200.000	43.200.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	210.000.000	1.310.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)	1	6	200.000.000	1.300.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	10.000.000	10.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	128.200.000	409.700.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	62.200.000	28.700.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	37.500.000	4.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	100	100	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	1.500.000	1.500.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	14.200.000	14.200.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	25.000.000	25.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	25.000.000	25.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	39.000.000	354.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	1	2	35.000.000	350.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	118.000.000	249.500.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	59.000.000	25.500.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	36.500.000	3.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	80	80	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	3.000.000	3.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	1.500.000	1.500.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	14.000.000	14.000.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	19.000.000	19.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	19.000.000	19.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	38.000.000	203.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)	1	1	35.000.000	200.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	3.000.000	3.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	141.900.000	673.400.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	73.500.000	40.000.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	38.500.000	5.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	120	120	6.000.000	6.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	22.000.000	22.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	26.400.000	26.400.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	26.400.000	26.400.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	40.000.000	605.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	1	3	35.000.000	600.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	5.000.000	5.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	434.000.000	434.000.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	26.500.000	26.500.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	120	120	6.000.000	6.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	10.500.000	10.500.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	3.000.000	3.000.000
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	1	1	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	202.500.000	202.500.000
X XX 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	2.500.000	2.500.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	71,00	77,81	400.000.000	400.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	400.000.000	400.000.000
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	13	13	400.000.000	400.000.000
X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	9	9	300.000.000	300.000.000
X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	4	4	100.000.000	100.000.000
					200.667.206.000	266.820.046.000

Tabel 4.1.
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	59,50	62,52	135.552.146.000	194.469.288.000
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	51,45	56,27	17.974.867.000	42.106.589.000
2 15 02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	52,34	43,10	7.317.436.000	20.979.395.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (Perlengkapan Jalan)	4.252	5.991	6.281.325.000	20.739.075.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				6.281.325.000	20.739.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu (Buah)	350	772	382.000.000	810.600.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Buah)	29	94	273.825.000	838.950.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan APILL (Unit)	2	2	515.000.000	525.000.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Unit)	10	16	272.500.000	420.000.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ITS (Paket)	-	2	-	1.575.000.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Unit)	250	853	4.838.000.000	16.569.525.000
		Jumlah Pengadaan Aplikator Marka (Unit)	-	-	-	-
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				911.111.000	115.320.000
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (Kab/Kota)	42	18	60.000.000	46.320.000
		Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLM untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Kali)	26	12	804.791.000	30.000.000
		Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi)	18	32	46.320.000	39.000.000
2 15 02 1.05 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota)	21	18	60.000.000	46.320.000
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok)	6	6	804.791.000	30.000.000
2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ (Kegiatan)	18	6	46.320.000	39.000.000
2 15 02 1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi (Dok)	119	137	125.000.000	125.000.000
2 15 02 1.06 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah penilaian dan pengawasan Andalalin di Ruas Jalan Provinsi (Dok)	24	24	125.000.000	125.000.000
		Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	17,08	235.000.000	235.000.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				235.000.000	235.000.000
		Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang)	362	459	200.000.000	200.000.000
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (Kegiatan)	12	12	35.000.000	35.000.000
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				200.000.000	200.000.000
		Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan (orang)	35	92	70.000.000	70.000.000
		Jumlah peserta Abdi Yasa yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan (orang)	70	56	130.000.000	130.000.000
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				35.000.000	35.000.000
		Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan)	20	20	35.000.000	35.000.000
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	31,25	37,50	876.280.000	2.205.075.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				876.280.000	2.205.075.000
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (lok)	10	38	410.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Km)	10,25	37,50	466.280.000	352.000.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				38	410.000.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	38	240.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	30	125	170.000.000	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				466.280.000	352.000.000
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	50	20	275.000.000	112.000.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	50	50	191.280.000	240.000.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50,00	60,00	840.980.000	2.214.955.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				840.980.000	2.214.955.000
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (lok)	10	10	340.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Km)	10,05	8,30	500.980.000	361.880.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				340.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	340.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				500.980.000	361.880.000
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	55	20	302.500.000	112.280.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	52	52	198.480.000	249.600.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	75,00	949.880.000	2.333.515.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				949.880.000	2.333.515.000
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (lok)	10	10	328.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Km)	11,45	9,45	621.880.000	480.440.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				328.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	328.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	60	20	621.880.000	480.440.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	76	76	284.880.000	364.800.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	46,15	1.113.880.000	2.274.235.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (lok)	10	10	540.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Km)	9,75	7,75	573.880.000	421.160.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	240.000.000	1.047.200.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	25	125	300.000.000	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000
		jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	-	-	-	-
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	60	20	573.880.000	421.160.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	62	62	236.880.000	307.200.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	92,31	843.480.000	2.214.955.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	10	10	370.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Km)	9,75	8,25	473.480.000	361.880.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	370.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh)	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh)	-	-	-	-
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	50	20	473.480.000	361.880.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	52	52	198.480.000	249.600.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	41,38	862.180.000	2.175.435.000
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	10	10	390.000.000	1.853.075.000
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Km)	10,25	8,50	472.180.000	322.360.000
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	10.000	47.600	390.000.000	1.853.075.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	-	125	-	656.250.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	-	215	-	112.875.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	-	7	-	36.750.000
		Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)	-	-	-	-
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penggantian LPJU (unit)	55	20	472.180.000	322.360.000
		Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)	44	44	302.500.000	111.160.000
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	-	-	-	-
2 15 05	Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	54,55	3.398.751.000	5.247.024.000
2 15 05 1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	10	-	3.398.751.000	-
		Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	-	11,13	-	5.247.024.000
2 15 05 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Kegiatan)	-	-	3.398.751.000	-
2 15 05 1.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	4	-	877.024.000	5.247.024.000
		Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	3	4	242.000.000	877.024.000
		Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA (Lok)	-	-	-	-
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang (lok)	-	6	-	400.000.000
		Jumlah Pengadaan Gazon di perlintasan Sebidang (bh)	7	-	2.279.727.000	-
		Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System (lok)	-	6	-	3.486.000.000
2 15 03	Pengelolaan Pelayaran	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75,00	87,50	1.537.000.000	2.227.000.000
2 15 03 1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (Lokasi)	6,00	6,00	1.317.000.000	2.077.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
2 15 03 1.10 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	30.000.000	30.000.000
2 15 03 1.10 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.240.000.000	2.000.000.000
		Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit)	3	-	75.000.000	-
		Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai (lokasi)	3	2	1.165.000.000	2.000.000.000
2 15 03 1.10 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				47.000.000	47.000.000
		Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP (Orang)	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (dokumen)	12	12	47.000.000	47.000.000
		Jumlah alat keselamatan ASDP (Buah)	-	-	-	-
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Lokasi)	3	4	220.000.000	150.000.000
2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				220.000.000	150.000.000
		Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan (Lok)	3	3	20.250.000	20.250.000
		Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku)	10	10	8.585.000	8.585.000
		Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok)	2	2	10.900.000	10.900.000
		Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Lok)	13	13	180.265.000	110.265.000
		Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan SBNP (lok)	-	-	-	-
		Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran (lok)	-	-	-	-
	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	60,38	64,61	13.225.860.000	41.129.760.000
2 15 02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	5,83	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (Kendaraan)	366	366	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000	50.000.000
		Jumlah Evaluasi Trayek AKDP (dokumen)	-	-	-	-
		Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan)	30	30	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	-	-	-	-
2 15 02 1.15 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi (Trayek)	-	-	-	-
		Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	98,76	1.540.000.000	1.590.000.000
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	4.406.000	4.406.000	1.450.000.000	1.500.000.000
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok)	28	28	1.450.000.000	1.500.000.000
2 15 02 1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (Perusahaan)	15	15	40.000.000	40.000.000
2 15 02 1.12 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				40.000.000	40.000.000
		Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok)	1	1	20.000.000	20.000.000
		Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan)	1	1	20.000.000	20.000.000
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (perusahaan)	15	15	50.000.000	50.000.000
2 15 02 1.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi				50.000.000	50.000.000
		Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan)	1	1	25.000.000	25.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek (Perusahaan)	15	15	25.000.000	25.000.000
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	47,62	230.000.000	280.000.000
2 15 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (trayek)	5	5	180.000.000	180.000.000
2 15 02 1.09 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.000.000	70.000.000
		Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng (Paket)	-	-	-	-
		Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal (Dok)	-	-	-	-
		Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok)	1	1	70.000.000	70.000.000
2 15 02 1.09 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				110.000.000	110.000.000
		Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi (Org)	300	300	110.000.000	110.000.000
		Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM (Lok)	-	-	-	-
2 15 02 1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	4	4	50.000.000	100.000.000
2 15 02 1.11 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis (Kali)	2	2	50.000.000	100.000.000
		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	43,75	53,13	7.562.129.000	36.112.429.000
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (terminal)	14,00	14	7.562.129.000	36.112.429.000
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	-	1	4.617.429.000	100.000.000
		Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	1,00	100,00	4.517.429.000	300.000.000
2 15 02 1.03 02	Pembangunan Gedung Terminal				-	20.500.000.000
		Jumlah Pembangunan Terminal (Tahapan)	1	1	100.000.000	20.000.000.000
		Jumlah Pengadaan Tanah Terminal (Paket)	-	-	2.850.000.000	-

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal (Paket)	5	1	2.730.000.000	500.000.000
2	15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	-	-	-	15.477.729.000
		Jumlah Pengembangan Terminal (Terminal)	-	3	-	15.127.729.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV (Terminal)	5	-	120.000.000	-
		Jumlah Penerapan Sistem Informasi (Terminal)	-	-	34.700.000	-
		Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal (Paket)	4	3	34.700.000	350.000.000
2	15 02 1.03 5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	-	-	-	34.700.000
		Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Tipe B (Kali)	1	4	60.000.000	34.700.000
		Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Tipe B (Terminal)	100	-	600.000.000	-
2	15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	-	600.000.000	300.000.000
		Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	1	-	600.000.000	300.000.000
2	15 02 1.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-	600.000.000	300.000.000
		Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (dok)	1	-	400.000.000	-
		Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis (Lok)	8	6	200.000.000	300.000.000
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	53,03	210.625.000	140.625.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	512	521	25.000.000	25.000.000
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kend)	-	-	25.000.000	25.000.000
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	9	9	12.500.000	12.500.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	9	9	12.500.000	12.500.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	34.373	86.247	15.625.000	15.625.000
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	15.625.000	15.625.000
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	-	-	-	-
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8	8	170.000.000	100.000.000
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	4	170.000.000	100.000.000
		Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah I Kelas A (lok)	-	-	-	-
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	44,09	115.950.000	90.750.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	296	305	20.000.000	20.000.000
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	20.000.000	20.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	6	6	10.000.000	10.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	6	6	10.000.000	10.000.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5.733	18.697	10.500.000	10.500.000
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	10.500.000	10.500.000
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	-	-	-	-
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	4	85.450.000	60.250.000
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	-	-	-	-
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2	2	85.450.000	60.250.000
		Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah II Kelas B (lok)	-	-	-	-
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	52,86	404.650.000	241.250.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	564	573	40.850.000	40.850.000
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	40.850.000	40.850.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	10	10	20.000.000	20.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	10	10	20.850.000	20.850.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	108.405	754.668	50.400.000	50.400.000
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	50.400.000	50.400.000
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	-	-	-	-
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22	22	313.400.000	150.000.000
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	11	11	313.400.000	150.000.000
		Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah III Kelas A (lok)	-	-	-	-
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	79,89	197.800.000	130.000.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	878	890	30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	24.191	70.024	25.000.000	25.000.000
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	-	-	-	-
2	15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	365	365	25.000.000	25.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	-	-	-	-
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8	6	142.800.000	75.000.000
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	-	-	-	-
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	3	142.800.000	75.000.000
		Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah IV Kelas A (lok)	-	-	-	-
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	66,90	195.500.000	195.500.000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	845	860	30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	-	-	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif		
			2023	2024	2023	2024	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	6	6	15.000.000	15.000.000	
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	6	6	15.000.000	15.000.000	
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	50.074	174.662	15.500.000	15.500.000	
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	365	365	15.500.000	15.500.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	8	8	150.000.000	150.000.000	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	4	4	150.000.000	150.000.000	
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	83,55	84,68	251.990.000	201.990.000	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	1.107	1.125	30.000.000	30.000.000	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi					30.000.000	30.000.000
		Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000	
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	7	7	15.000.000	15.000.000	
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	39.781	152.025	21.990.000	21.990.000	
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)	365	365	21.990.000	21.990.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	10	10	200.000.000	150.000.000	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	5	5	200.000.000	150.000.000	
2 15 03	Pengelolaan Pelayaran	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	51,12	52,99	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (Perusahaan)	274	284	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (BAP)	50	50	135.000.000	65.000.000	
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					-	-
		Jumlah BinteK Penyelenggaraan dan pengusaha jasa pengurusan transportasi di perairan; (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah BinteK Penyelenggaraan dan pengusaha Depo Peti Kemas; (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah BinteK Penyelenggaraan dan pengusaha bongkar muat barang (org)	-	-	-	-	-
		Jumlah Appraisal KMC. Kartini I (Paket)	-	-	-	-	-
		Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	92,66	1.732.216.000	1.732.216.000	
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip/tahun)	14	14	1.732.216.000	1.732.216.000	
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini I (Paket)	1	1	1.732.216.000	1.732.216.000	
	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67	66,67	104.351.419.000	111.232.939.000	
2 15 02	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	36,48	104.351.419.000	111.232.939.000	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Bus)	107	112	102.730.399.000	109.132.939.000	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (koridor)	7	7	102.730.399.000	109.132.939.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (Shelter)	210	224	1.621.020.000	2.100.000.000	
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng (Paket)	2	2	1.621.020.000	2.100.000.000	
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	65.115.060.000	72.350.758.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	64.715.060.000	71.950.758.000	
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	63.305.408.000	67.917.106.000	
X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	48.113.502.000	52.303.200.000	
X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12	12	47.223.302.000	51.413.000.000	
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	820.200.000	820.200.000	
X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran PD yang disusun	12	12	70.000.000	70.000.000	
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	165.000.000	165.000.000	
X XX 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12	12	165.000.000	165.000.000	
X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	125.000.000	50.000.000	
X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	-	-	-	-	
X XX 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	20.000.000	20.000.000	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	20	20	105.000.000	30.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	2.148.000.000	2.061.000.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	-	-	-	-
		Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	1.760	800	88.000.000	40.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	50.000.000	50.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	165.000.000	126.000.000
X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	12	12	60.000.000	60.000.000
X XX 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	1.500.000.000	1.500.000.000
X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	3.000	3.000	60.000.000	60.000.000
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	-	105.000.000	-
X XX 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	-	-
X XX 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	-	-	-	-
X XX 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	-	-	-	-
X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
X XX 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	5	-	105.000.000	-
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	11.261.506.000	11.250.506.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12	12	1.811.000.000	1.800.000.000
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	9.446.506.000	9.446.506.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	1.387.400.000	2.087.400.000
X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12	12	687.400.000	687.400.000
X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	150.000.000	150.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)	2	8	300.000.000	1.000.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	12	12	100.000.000	100.000.000
X XX 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12	12	150.000.000	150.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	118.840.000	600.340.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	57.840.000	24.340.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	37.500.000	4.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	100	100	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	1.500.000	1.500.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	9.840.000	9.840.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	20.000.000	20.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	39.000.000	554.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)	1	3	35.000.000	550.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	92.112.000	223.612.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	47.112.000	13.612.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	35.500.000	2.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	60	60	3.000.000	3.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	1.000.000	1.000.000
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	5.612.000	5.612.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	36.000.000	201.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)	1	1	35.000.000	200.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	12	1.000.000	1.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif		
			2023	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	376.600.000	1.443.100.000	
X	XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Asn (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	121.400.000	87.900.000
X	XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	44.500.000	11.000.000
X	XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	240	240	12.000.000	12.000.000
X	XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	11.000.000	11.000.000
X	XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	5.500.000	5.500.000
X	XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	48.400.000	48.400.000
X	XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	43.200.000	43.200.000
X	XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)	-	-	-	-
X	XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	43.200.000	43.200.000
X	XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	210.000.000	1.310.000.000
X	XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)	1	6	200.000.000	1.300.000.000
X	XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	12	10.000.000	10.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	128.200.000	409.700.000	
X	XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	62.200.000	28.700.000
X	XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	37.500.000	4.000.000
X	XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	100	100	5.000.000	5.000.000
X	XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
X	XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	1.500.000	1.500.000
X	XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	14.200.000	14.200.000
X	XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	25.000.000	25.000.000
X	XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	-	-	-	-
X	XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	25.000.000	25.000.000
X	XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	39.000.000	354.000.000
X	XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	1	2	35.000.000	350.000.000
X	XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	12	4.000.000	4.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	118.000.000	249.500.000	
X	XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	59.000.000	25.500.000
X	XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	36.500.000	3.000.000
X	XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	80	80	4.000.000	4.000.000
X	XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	3.000.000	3.000.000
X	XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	1.500.000	1.500.000
X	XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	14.000.000	14.000.000
X	XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	19.000.000	19.000.000
X	XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)	-	-	-	-
X	XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	19.000.000	19.000.000
X	XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	38.000.000	203.000.000
X	XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)	1	1	35.000.000	200.000.000
X	XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	12	3.000.000	3.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	141.900.000	673.400.000	
X	XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	73.500.000	40.000.000
X	XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	38.500.000	5.000.000
X	XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	120	120	6.000.000	6.000.000
X	XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	5.000.000	5.000.000
X	XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	2.000.000	2.000.000
X	XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	22.000.000	22.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			2023	2024	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	26.400.000	26.400.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	26.400.000	26.400.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	40.000.000	605.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	1	3	35.000.000	600.000.000
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	12	5.000.000	5.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100,00	100,00	434.000.000	434.000.000
X XX 01 1.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	26.500.000	26.500.000
X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	7.000.000	7.000.000
X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	120	120	6.000.000	6.000.000
X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	10.500.000	10.500.000
X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	3.000.000	3.000.000
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	1	1	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	5.000.000	5.000.000
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	202.500.000	202.500.000
X XX 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	200.000.000	200.000.000
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	-	-
X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	12	2.500.000	2.500.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	71,00	77,81	400.000.000	400.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	400.000.000	400.000.000
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	13	13	400.000.000	400.000.000
X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	9	9	300.000.000	300.000.000
X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	4	4	100.000.000	100.000.000
					200.667.206.000	266.820.046.000

BAB V
PENUTUP

1. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Kerja Kementerian Perhubungan 2023 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2023. Proses penyusunan Renja 2023 paralel / sinergi dengan dinamika proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional yang dimungkinkan belum selesai tuntas saat tahapan perencanaan berakhir. Di lain pihak, Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam Renja menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan pendanaan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renja adalah :
 - a. Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan visi, misi dan program kerja prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renja PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RKPD Tahun 2023 melalui Forum Musrenbang;
 - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renja PD berdasarkan RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai Pergub.
3. Tindak lanjut dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun RKA-PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 10 November 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710914 199703 1006